

Perempuan Pekerja Migran: Kajian Perlindungan *Personal Human Security* Tenaga Kerja Indonesia

Vidi Milathul Faudzan, S1 Ilmu Hubungan Internasional

Yusrina Fitri Ayuninda, S1 Ilmu Hubungan Internasional

Dito Afako, S1 Ilmu Hukum

Abstract

In 2016, the number of Indonesian migrant workers (TKI) are counted 3,510,000. 4,860 of them were reported complaining of violence, and there were 217 TKI reported dead in the same year. The facts and data that have been submitted, show that female Indonesian migrant workers who work in the informal sector are very vulnerable to acts of threats and other hazards. These violence and threats clearly endanger their human security. Departing from this, the author will be researching on the factors why the community chose to become TKI and how to implement human security for female migrant workers currently carried out by the Government of Indonesia. The method used in this study is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews and literature studies. Based on the results of research conducted in the UU No. 18 Tahun 2017, it has guaranteed the safety of migrant workers, but not related to specific gender.

Keywords: *Indonesia, migrants workers, women, human security, personal*

1. Pendahuluan

Di Indonesia, migrasi menjadi salah satu fenomena yang turut membantu bagi banyak masyarakat. Faktor kemudahan melakukan migrasi dan rendahnya lapangan pekerjaan menjadi pendorong banyak warga negara Indonesia (WNI) memilih untuk bekerja di luar negeri. Sejak bulan Januari hingga Agustus 2017, sejumlah 148.285 WNI ditempatkan ke luar negeri untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).¹ Penempatan TKI terbagi menjadi dua sektor yaitu sektor formal dan informal. Pekerjaan TKI sektor informal meliputi pekerja rumah tangga, pengasuh anak, pengasuh orang tua, serta buruh pabrik. Berdasarkan data yang dipublikasikan Bank Indonesia pada periode tahun 2016-2017, terdapat sebanyak 3,496 juta TKI legal di luar

¹ BNP2TKI, 2017, "148.285 TKI Ditempatkan di Luar Negeri", Diakses 5 Mei 2019 <http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI>.

negeri, dengan Malaysia sebagai negara penerima TKI terbesar, yakni sebanyak 1,853 juta.² Dari data tersebut dapat dilihat bahwa lebih dari setengah TKI memilih Malaysia sebagai negara tujuan utama.

Mudahnya proses bermigrasi membuat sebagian orang yang akan menjadi TKI memilih untuk tidak mengikuti prosedur yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang pada akhirnya, membuat status ilegal pada TKI. Hal tersebut akhirnya menimbulkan permasalahan baru, karena secara hukum TKI ilegal tidak memiliki perlindungan hukum di negara tujuan. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dalam pernyataannya di Serawak, Malaysia pada 22 November 2017, menyatakan bahwa saat ini terdapat 2,7 juta TKI di Malaysia dan hanya setengahnya saja yang merupakan TKI legal dengan dokumen-dokumen yang lengkap.³

Besarnya jumlah TKI di luar negeri tidak seimbang dengan besarnya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada TKI tersebut. Hal ini kemudian dibuktikan dengan data pada tahun 2016, di mana terdapat 4.860 kasus pengaduan mengenai penganiayaan dan terdapat 217 TKI yang meninggal dunia. Jumlah ini jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan hampir 20% yaitu 190 TKI.⁴ Ditemukan juga kasus *overcharging* (kelebihan jam kerja) dan *overstay* (tinggal lebih lama dibanding waktu yang telah ditentukan) TKI sebanyak 33 kasus.⁵ Selain itu, berdasarkan laporan dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) diketahui terdapat peningkatan kasus pelanggaran kontraktual sebanyak 1.050 kasus selama tahun 2016-2017.⁶ Hal ini tentu menjadi permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia sebagai aktor utama yang seharusnya melindungi seluruh warga negara Indonesia.

Dari penelitian terdahulu juga disebutkan, bahwa perundangan-undangan terkait tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yakni Undang-undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, lebih banyak mengatur prosedural

² BI, 2017, “Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia”, Diakses 5 Mei 2019 http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf.

³ Ade Putra, 2017, “Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar di Seluruh Dunia”, Diakses 5 Mei 2019 <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia>.

⁴ Kustin Ayuwuragil, 2018, “Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Meningkat”, Diakses 6 Mei 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malah-meningkat>.

⁵ Ibid.

⁶ Ibid.

dan tata cara penempatan TKI di luar negeri, serta hanya sedikit mengatur hak-hak dan jaminan perlindungan hak-hak buruh migran dan anggota keluarganya. Selain itu, dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 disebutkan bahwa seluruh TKI yang bertugas memiliki hak-hak perlindungan selama masa pra, penempatan, hingga purna, tetapi, masih banyak kasus penganiayaan yang dialami oleh TKI di luar negeri. Bahkan, berdasarkan pernyataan Erwiana, salah satu TKI yang mengalami penganiayaan, masih banyak TKI yang mengalami tindakan penganiayaan namun tidak berani untuk melaporkan kejahatan tersebut.⁷

TKI sebagai individu memiliki hak yang harus dilindungi negara, karena negara merupakan pihak yang memiliki fungsi untuk menciptakan *human security* bagi masyarakatnya. Melihat permasalahan yang dijelaskan, negara, dalam hal ini pemerintah Indonesia, gagal menciptakan *human security* bagi TKI terutama *personal human security* yang sangat melekat pada setiap individu. Masih banyak TKI di luar negeri yang mengalami kekerasan, di mana kasus yang terbaru adalah kasus Tuti Tursilawati yang dieksekusi mati oleh Pemerintah Arab Saudi.⁸ Kasus-kasus yang terjadi menunjukkan bahwa permasalahan *personal human security* yang dihadapi oleh para TKI sangat genting sehingga perlu segera diselesaikan. Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah dikemukakan, penelitian ini hadir sebagai analisis untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi seorang TKI dan bagaimana implementasi pemerintah dalam melindungi *personal human security* TKI.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan masalah yang telah disampaikan pada penelitian ini, penulis merumuskan dua masalah yang terkait yaitu: (1) apa faktor yang menyebabkan masyarakat berbondong-bondong menjadi seorang TKI?; dan (2) bagaimana implementasi pemerintah dalam melindungi *personal human security* TKI?

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat Indonesia memilih untuk menjadi TKI dan juga menggambarkan bagaimana implementasi perlindungan

⁷ Endang Nurdin, 2017, “TKI di Hing Kong: Angka penganiayaan fisik, seksual, dan diskriminasi rasial ‘tinggi’”, Diakses 6 Mei 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.

⁸ Friski Riana, 2018, “Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati”, Diakses 6 Mei 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>.

personal human security kepada TKI yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Setelah dipaparkan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan masyarakat memilih menjadi TKI dan bagaimana pemerintah melindungi *personal human security* TKI, maka dapat disimpulkan faktor apa yang memiliki pengaruh terbesar, serta melihat seberapa besar upaya pemerintah melindungi *personal human security* TKI.

Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi seorang individu untuk bekerja di luar negeri menjadi seorang TKI. Kemudian, untuk mengetahui bagaimana implementasi perlindungan *personal human security* TKI yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Penelitian ini dibatasi oleh wilayah tempat kerja mantan TKI, yaitu negara Hongkong.

Jenis dari sumber data pada penelitian ini adalah sumber data yang bersifat primer dan sekunder. Sumber data primer didapatkan melalui wawancara terhadap empat informan yang dalam hal ini adalah TKI maupun mantan TKI di Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sedangkan sumber data sekunder adalah data-data yang didapatkan oleh penulis yang bersumber dari dokumen, literatur, buku, jurnal, dan lainnya yang mendukung penelitian ini. Berikut merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

1. Wawancara mendalam (*Depth interview*)

Wawancara digunakan untuk mengecek kembali atau membuktikan ulang informasi yang didapatkan sebelumnya. Teknik wawancara yang dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif ialah wawancara mendalam.⁹ Wawancara dilakukan kepada para TKI maupun mantan TKI. Penggunaan wawancara pada penelitian ini berguna untuk mengetahui secara lebih mendalam alasan mengapa masyarakat menjadi TKI, serta bagaimana prosedur yang dilalui untuk menjadi TKI. Peneliti melakukan penyusunan pertanyaan-pertanyaan dan pedoman wawancara terlebih dahulu agar dalam pelaksanaan wawancara tidak ada pertanyaan-pertanyaan utama yang terlewat. Susunan pertanyaan dapat dilihat pada lampiran.

2. Studi pustaka

Penelitian ini juga melakukan studi pustaka terhadap dokumen-dokumen penunjang guna mengumpulkan data yang dibutuhkan. Studi pustaka merupakan penggalian informasi yang dibutuhkan dalam penelitian dengan menelusuri sejumlah fakta dan data yang telah

⁹ P. S. Rahmat, 2009, "*Jurnal Penelitian Kualitatif*". *Equilibrium Jurnal*, V(9), 1-8.

disimpan dalam bentuk dokumentasi.¹⁰ Dokumen-dokumen yang digunakan pada penelitian ini adalah data prosedur yang seharusnya dilakukan oleh seorang warga untuk menjadi TKI. Penelitian ini juga menggunakan artikel-artikel dan data valid lainnya yang menunjang untuk memenuhi kelengkapan dari data yang diperlukan.

Peneliti mengacu kepada teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Heberman yang dijelaskan oleh Sugiyono dalam bukunya untuk melakukan analisis data pada penelitian ini. Berikut ini merupakan tahapan dari teknik analisis data tersebut.¹¹

1. Reduksi Data

Pada proses ini dilakukan penyaringan atau pemilihan data untuk mendapatkan data-data penting yang dibutuhkan guna mendukung pembuatan laporan penelitian.

2. *Display Data*

Proses ini menampilkan sekumpulan data yang dapat memberi kemungkinan dalam penarikan kesimpulan dan melakukan suatu tindakan.

3. Verifikasi dan Penarikan Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data yang ada. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperdalam penelitiannya.¹²

4. Hasil dan Pembahasan

A. Faktor yang Membuat Individu Memilih Menjadi TKI

Faktor yang membuat seorang individu memutuskan untuk menjadi TKI menurut Everett Lee adalah *push factors*, *pull factors*, *intervening obstacles*, dan *personal factors*. Berikut ini adalah pembahasan mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis berdasarkan *push and pull theory* oleh Everett Lee. *Push pull theory* oleh Everett Lee memberikan penjelasan bahwa dalam keputusan yang diambil oleh seorang individu, tidak hanya bergantung kepada faktor-faktor yang nampak, baik di daerah asal maupun negara tujuan, namun juga faktor tidak nampak seperti persepsi seorang individu terhadap kondisi tersebut, di mana pada akhirnya terdapat kemungkinan bagi faktor personal tersebut memiliki

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid., hal. 246-263

¹² Ibid., hal. 246-253.

pengaruh terbesar dalam pengambilan keputusan bermigrasi. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai *push and pull theory* oleh Everett Lee:¹³

1. Faktor di daerah asal merupakan faktor yang akan mendorong (*push factors*) seseorang untuk pergi meninggalkan daerah tersebut

a. Faktor ekonomi

Secara garis besar migrasi yang dilakukan oleh penduduk bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup. Faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong seseorang untuk melakukan migrasi.

b. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan memiliki peran dalam mendorong migrasi. Hal itu, seperti yang dikatakan Lee, bahwa “volume migrasi di suatu wilayah tertentu berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya dan menjadi daya tarik bagi penduduk”. Faktor pendidikan pun berhubungan dengan ekonomi, di mana tingkat pendidikan penduduk sebanding dengan tingkat perekonomiannya, sehingga ketika pendidikan suatu daerah rendah maka perkembangan ekonomi di daerah tersebut pun dapat menyebabkan rendahnya pendapatan penduduk di daerah tersebut.

c. Faktor transportasi

Transportasi adalah sarana penduduk untuk melakukan mobilitas, maka dengan tersedianya transportasi yang memadai, penduduk akan lebih mudah untuk melakukan mobilisasi.

2. Faktor di daerah tujuan merupakan faktor yang akan menarik seseorang untuk melakukan migrasi ke daerah tersebut (*pull factors*). Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tersedianya lapangan pekerjaan

b. Kesempatan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi

c. Kesempatan yang lebih tinggi dalam memperoleh pendidikan

d. Keadaan lingkungan yang menyenangkan

e. Kemajuan di tempat tujuan

3. Faktor antara merupakan faktor yang dapat menjadi rintangan (*intervening obstacles*) bagi terjadinya migrasi antara dua daerah (daerah asal dengan daerah tujuan). Faktor yang

¹³ Everett Lee, 1966, “*A Theory of Migration*”, *Demography*, 3(1), 47-57.

menjadi rintangan dalam proses migrasi adalah jarak, namun jarak dalam hal ini tidak selalu menjadi penghalang untuk terjadinya migrasi. Jarak memiliki pengaruh yang berbeda kepada tiap-tiap individu. Bagi beberapa orang jarak dilihat sebagai rintangan dan penghalang yang membuat mereka merasa berat untuk melakukan migrasi, tetapi bagi sebagian orang jarak bukanlah sebuah masalah.

4. Faktor personal atau pribadi (*personal factors*) adalah faktor yang mendasari terjadinya migrasi. Faktor personal menjadi penentu apakah seseorang mengambil tindakan untuk bermigrasi atau tidak. Sebesar apapun *push* dan *pull factors* yang dihadapi seorang individu, tetapi tanpa faktor personal yang akan membulatkan tekad, maka migrasi tidak akan terjadi.

Gambaran sederhana mengenai hubungan faktor-faktor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Push and Pull Factors, dan Intervening Obstacles
(Sumber: Everett Lee, 1966, A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 47-57)

Pertama, faktor positif dengan tanda (+) pada Gambar 1 adalah faktor yang membuat seseorang untuk tetap berada di daerah asal atau menarik orang luar untuk bermigrasi ke daerah tersebut seperti perekonomian yang baik, pendidikan yang baik, dan ketersediaan sarana transportasi, dan lain-lain.

Kedua, faktor negatif dengan tanda (-) merupakan faktor yang kurang menyenangkan dan membuat seseorang untuk meninggalkan suatu daerah seperti tidak adanya peluang usaha, perekonomian yang tidak baik, dan pendidikan yang tidak baik. Terakhir adalah faktor netral yang ditandai dengan tanda (o) adalah faktor yang tidak menjadi persoalan atau dalam kata lain tidak memiliki pengaruh dalam terjadinya proses migrasi.

Push Factor

Push factor dapat dikatakan sebagai faktor yang berada di daerah asal TKI dan menjadi pendorong mengapa seorang individu memilih untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Berikut adalah faktor-faktor pendorong tersebut:

a. Faktor Ekonomi

Dilihat dari pendapatan domestik regional bruto (PDRB) perkapita kota-kota di Jawa Timur, pendapatan penduduk Kabupaten Malang dapat dikatakan cukup rendah. Kabupaten Malang menduduki peringkat ke-13 dengan total pendapatan perkapita sebesar 31,940 juta rupiah. Untuk lebih lengkapnya data PDRB dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. PDRB Perkapita Kabupaten/Kota Jawa Timur 2016

No	Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota	PDRB Perkapita ADHB (Ribu Rupiah)	No	Kab/Kota dg Total 38 Kab/Kota	PDRB Perkapita ADHB (Ribu Rupiah)
1	Gresik	84899.60	20	Blitar	25516.20
2	Sidoarjo	74410.90	21	Probolinggo	24430.20
3	Kota Malang	66758.10	22	Magetan	24192.60
4	Kota Batu	63776.50	23	Situbondo	24177.30
5	Kota Madiun	63696.50	24	Pacitan	23115.40
6	Mojokerto	59287.40	25	Madiun	22458.70
7	Tuban	45158.30	26	Trenggalek	21576.70
8	Kota Mojokerto	42492.30	27	Kediri	21362.60
9	Banyuwangi	41468.20	28	Bondowoso	20727.40
10	Kota Blitar	38334.20	29	Nganjuk	20186.50
11	Kota Kediri	379190.70	30	Ngawi	19928.10
12	Kota Pasuruan	33435.30	31	Ponorogo	18899.60
13	Malang	31940.10	32	Sampang	17140.40
14	Tulungagung	30335.50	33	Pamekasan	15833.60
15	Sumenep	26902.90	34	Kota Surabaya	157730.20
16	Lamongan	26686.30	35	Pasuruan	72085
17	Jember	25824.70	36	Bojonegoro	44810
18	Lumajang	25769.60	37	Kota Probolinggo	38460
19	Jombang	25642.20	38	Bangkalan	20758

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016

Lebih spesifiknya, pendapatan yang didapatkan oleh para TKI lebih rendah dari pendapatan perkapita yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), di mana hampir seluruh informan yang diwawancarai oleh penulis hanya bekerja sebagai buruh tani sebelum menjadi TKI.

b. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan penduduk Jawa Timur khususnya Kabupaten Malang dapat dilihat dari rata-rata lama penduduk mengenyam bangku pendidikan. Untuk lebih jelasnya, data terkait rata-rata lama sekolah dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Kabupaten Malang dan Jawa Timur.

Kab/Kota	Rata-rata Lama Sekolah (Penduduk 15 tahun keatas) (Tahun)						
	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Kabupaten Malang	6.98	6.73	6.66	6.59	6.51	6.35	6.34
Jawa Timur	7.23	7.14	7.05	6.90	6.85	6.79	6.73

(Sumber: Badan Pusat Statistik, 2016)

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel 2, rata-rata penduduk Kabupaten Malang mengenyam pendidikan selama 6,98 tahun yang mana angka tersebut berada di bawah rata-rata provinsi. Angka 6,98 tahun mengartikan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Malang hanyalah lulusan SD yang berarti tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Malang sangatlah rendah. Kemudian dilihat dari status informan yang diwawancarai oleh penulis, empat dari empat informan merupakan lulusan SMA. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa rata-rata pekerja TKI merupakan penduduk dengan tingkat pendidikan yang rendah. Rendahnya tingkat pendidikan tersebut membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan karena keterbatasan *skill* yang dimiliki, dan akhirnya mereka lebih memilih untuk bekerja di luar negeri meskipun di sektor informal, karena tawaran gaji diberikan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan bekerja di daerahnya.

c. Faktor Transportasi

Transportasi adalah sarana yang mendukung penduduk untuk melakukan mobilisasi. Semakin tinggi ketersediaan transportasi di suatu daerah, maka semakin tinggi pula tingkat mobilitas dari daerah tersebut. Transportasi di Kabupaten Malang sendiri, berdasarkan

pengamatan penulis, adalah cukup memadai. Hal itu ditandai dengan tersedianya berbagai macam moda transportasi yaitu seperti angkutan umum, bus antar-kota, kereta api, hingga ojek.

Kemudian untuk aksesibilitas keluar-masuk ke luar negeri sendiri, di wilayah Jawa Timur sudah terdapat bandar udara dengan skala internasional yaitu Bandar Udara Juanda yang terletak di Sidoarjo. Penerbangan menuju negara yang menjadi tujuan para TKI seperti Hongkong, Taiwan, Malaysia, dan negara lainnya sudah dapat dilayani oleh Bandar Udara Juanda, oleh sebab itu kehadiran bandar di wilayah ini memberikan kemudahan bagi penduduk Jawa Timur khususnya para TKI untuk melakukan migrasi.

Pull Factor

Pull factor merupakan faktor-faktor di daerah tujuan TKI yang menjadi pendorong individu untuk bekerja di daerah tersebut sebagai TKI. Adapun *pull factors* tersebut adalah sebagai berikut.

a. Tersedianya Lapangan Pekerjaan

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Hongkong memiliki lapangan pekerjaan yang banyak, dengan jumlah sumber daya manusia yang sedikit. Pekerjaan-pekerjaan yang tersedia pun beragam, sesuai dengan kapabilitas dan kemampuan yang dimiliki oleh calon individu tersebut. Jenis-jenis pekerjaan bagi mereka yang berpendidikan tinggi umumnya berada di sektor formal, sementara jenis-jenis pekerjaan di sektor informal umumnya diisi oleh TKI dengan kapabilitas yang tidak terlalu tinggi. Jenis-jenis pekerjaan bagi calon pekerja berpendidikan rendah dan menengah juga beragam, seperti menjadi asisten rumah tangga, penjaga bayi, penjaga manula, dan sebagainya.

b. Kesempatan Memperoleh Pendapatan yang Lebih Tinggi

Pendapatan atau gaji di Hongkong dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2 Rata-rata Gaji di Hongkong per Kuartal (1999 – 2018)

(Sumber Tradingeconomics.com | Census dan Statistic Department, Hongkong)

Pada Gambar 1, jumlah gaji di Hongkong sendiri mengalami fluktuasi. Akan tetapi, apabila diamati, umumnya gaji yang diterima mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah gaji pada tahun sebelumnya. Para informan sendiri hanya menempuh pendidikan menengah, sehingga mengalami kesulitan untuk memperoleh pekerjaan yang memiliki pendapatan tinggi di Indonesia. Sementara itu, di Hongkong gaji yang ditawarkan lebih tinggi, sekalipun pekerjaannya bersifat informal seperti asisten rumah tangga maupun penjaga manula.

c. Kesempatan yang Lebih Tinggi Memperoleh Pendidikan

Hongkong kerap kali berada dalam posisi atas dalam hal pendidikan. Menurut publikasi QS Best Student City Rankings yang dikeluarkan oleh Quacquarelli Symonds pada tahun 2014-2018, Hongkong selalu berada di posisi 15 besar. Bahkan pada tahun 2015, Hongkong berada di posisi kelima.¹⁴ Berdasarkan Tabel 2, terlihat bahwa rata-rata warga Kabupaten Malang umumnya merupakan lulusan SD. Apabila dikaitkan dengan para informan, rata-rata informan sendiri tidak sempat menempuh pendidikan tinggi. Seluruh informan merupakan lulusan sekolah menengah. Meskipun memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, para informan justru tidak melakukannya. Hal tersebut dikarenakan motivasi para informan sendiri adalah untuk fokus bekerja. Di samping itu, para informan terikat pada kontrak kerja dan memiliki sedikit waktu luang, sehingga sangat tidak memungkinkan untuk melanjutkan pendidikan.

d. Keadaan Lingkungan yang Menyenangkan

Banyak hal yang menjadi pertanyaan ketika mengetahui bahwa ada seorang ibu-ibu yang rela meninggalkan anaknya demi berangkat ke negeri asing yang tidak diketahui keadaannya. Perbedaan yang mencolok sekali antara Hongkong dan Indonesia dapat dilihat dari sarana transportasi, geografis, dan tingkat kedisiplinan warganya.

Hal pertama yang akan dilihat para TKI ketika sampai di bandara adalah kebersihan dan keteraturan dalam pengelolaan fasilitas bandara.¹⁵ Setelah keluar dari bandara, para TKI bisa memilih alat transportasi yang akan digunakan untuk menuju ke tempat tujuan. Hongkong

¹⁴ Topuniversities.com, 2018, Hongkong, Diakses dari <https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/hong-kong> pada 15 Mei 2018.

¹⁵ SuaraBMI.com. “Melihat Sejenak Kehidupan TKI di Hongkong”. Diakses 8 Mei 2019 <http://www.suarabmi.com/2016/04/melihat-sejenak-kehidupan-tki-di.html>.

memiliki alat transportasi dalam kota seperti, kereta api, tram, bus, taksi dan feri. Di sana tidak ditemukan polisi ditengah jalan yang mengatur lalu lintas, melainkan hanya akan ditemukan kamera-kamera pengintai, berbeda dengan Indonesia yang terdapat polisi di persimpangan atau di sudut jalan. Pada hari libur, banyak ditemukan pemandangan berupa banyaknya wanita-wanita TKI yang sedang bersantai di pantai atau di halaman rumah majikan mereka.¹⁶

Empat narasumber kami menyatakan bahwa sebelumnya mereka tidak mengetahui bagaimana keadaan di Hongkong. Mereka hanya mendapatkan pemaparan ketika mereka tiba di Hongkong. Kebanyakan dari mereka berangkat karena dorongan ekonomi dari kondisi keluarga mereka. Empat narasumber juga menyatakan bahwa memang benar Hongkong memberikan lingkungan yang nyaman, bersih dan tertib, serta menerapkan aturan kebersihan yang cukup ketat. Beberapa peraturan mengenai kebersihan umum adalah:¹⁷

- 1) Dilarang makan dan minum di transportasi publik di Hongkong
- 2) Hongkong memiliki hukum yang ketat mengenai peraturan kebersihan lingkungan, termasuk denda tetap sebesar \$1500 untuk meludah atau mengotori sembarangan.
- 3) Hongkong juga memberikan standar yang tinggi untuk penjagaan dan pemeliharaan fasilitas umum untuk melindungi kesehatan umum.
- 4) Ruang cuci umum dan pembersih tangan dapat ditemukan di seluruh tempat wisata dan tempat perbelanjaan.

Soal transportasi umum juga sempat disinggung bahwa memang kebanyakan masyarakat Hongkong lebih suka berjalan kaki dan menggunakan transportasi publik untuk bepergian. Rata-rata dari empat narasumber mendapatkan jatah libur yang semestinya, sehingga mereka bisa jalan-jalan ke pantai atau sekedar bertemu dengan teman-teman seperjuangan di Hongkong.

e. Kemajuan di Tempat Tujuan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ DiscoverHongkong. “Kebersihan Publik”. Diakses 8 Mei 2019 <http://www.discoverhongkong.com/id/plan-your-trip/traveller-info/good-to-know/public-hygiene.jsp>.

Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia ini berdasarkan pendapatan perkapita yang diperoleh masing-masing negara. Berdasarkan pendapatan perkapita, ada 4 macam negara, yaitu sebagai berikut:¹⁸

- 1) Negara berpendapatan rendah, yakni negara yang memiliki pendapatan per kapita kurang dari US\$ 675.
- 2) Negara berpendapatan menengah bawah, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 675 - 2.695.
- 3) Negara berpendapatan menengah ke atas, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita antara US\$ 2.696 - 8.335.
- 4) Negara berpendapatan tinggi, yakni negara yang memiliki pendapatan perkapita lebih dari US\$ 8.336.

Umumnya, negara-negara maju memiliki ciri sebagai berikut:¹⁹

- 1) Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang cenderung tinggi
- 2) Perekonomian bertumpu pada sektor industri dan jasa
- 3) Angka pengangguran relatif rendah
- 4) Pendapatan perkapita yang berada dalam golongan tinggi
- 5) Memiliki banyak modal untuk pelaksanaan pembangunan

Narasumber kami yang berjumlah 4 orang tidak mengetahui apakah negara tujuan mereka termasuk kedalam negara maju atau berkembang. Mereka hanya tertarik pada gaji yang ditawarkan oleh tiap-tiap negara, terlepas dari kemampuan negara mereka dalam penerapan teknologi yang canggih, pendidikan yang mumpuni dan sebagainya. Mayoritas tujuan keberangkatan mereka ke luar negeri adalah untuk bekerja, bukan untuk melakukan pendidikan atau pertukaran teknologi dan semacamnya. Jadi, apakah negara tujuan narasumber kami termasuk dalam negara maju atau berkembang itu bukanlah menjadi faktor penentu keberangkatan mereka kesana.

Intervening Obstacles

Dalam perpindahan migrasi yang dilakukan oleh para TKI yang telah kami wawancarai, didapati bahwa mereka mengalami perpindahan jarak yang cukup jauh. Responden yang kami

¹⁸ Haornas, “*Pengelompokkan Negara Maju Dan Negara Berkembang Oleh UNDP*”, Diakses 8 Mei 2019 <https://www.scribd.com/doc/218126313/Pengelompokkan-Negara-Maju-Dan-Negara-Berkembang-Oleh-UNDP>.

¹⁹ *Ibid.*

wawancarai hanya bekerja di Hongkong, sehingga untuk perpindahan yang dialami oleh para TKI ini adalah dari Indonesia ke Hongkong atau sebaliknya. Perpindahan jarak yang jauh ini mereka lakukan sebagai upaya pemenuhan ekonomi bagi keluarga, mengingat para TKI yang kami wawancarai sudah berkeluarga dan memiliki anak.

Berbicara mengenai jarak geografis antara Indonesia dan Hongkong, kedua negara ini terpisah oleh negara negara ASEAN. Untuk jarak nyatanya, Indonesia dan Hongkong berjarak 3.271 km, dengan perhitungan jarak antara Ibukota masing masing negara. Perbedaan jarak yang sangat jauh ini akan menjadi faktor pendukung dalam penelitian yang kami lakukan. Perpindahan jarak yang dialami oleh para TKI yang kami wawancarai adalah sangat jauh, sehingga secara tidak langsung mereka akan menunjukkan pemikiran yang berbeda sesuai pengalamannya. Jarak juga diartikan sebagai jarak dari definisi maju tidaknya negara. Mereka dapat mengartikan bahwa Hongkong merupakan negara maju dengan indikator gaji besar dan pengalaman mereka sendiri selama berada disana terkait masalah kebersihan, teknologi ataupun kegiatan perekonomian. Jarak lain yang dapat menjadi topik pembicaraan adalah jarak kultur yang mereka alami. Kultur Indonesia dan kultur Hongkong pasti berbeda, sehingga mereka akan mampu membandingkan bagaimana kultur yang ada serta perbedaan dan persamaan dengan kultur di Indonesia. Terkait dengan jarak, kami melihat rintangan yang perlu dihadapi oleh TKI adalah jarak nyatanya menembus 3000 km sehingga perlu adanya adaptasi yang sangat berbeda antara Indonesia dan Hongkong. Selain itu, perbedaan budaya akan memberikan pengalaman tersendiri bagi mereka.

Dengan jarak yang demikian jauh itu, kami mempertanyakan alasan yang membuat para TKI masih berkeinginan untuk berangkat ke Hongkong. Berdasarkan penelitian kami, jarak nyata yang jauh rupanya bukanlah pendorong namun karena perasaan tergoda terhadap gaji yang dihasilkan dan keberhasilan kawan atau saudaranya. Faktor upaya pemenuhan ekonomi adalah pendorong mereka melintasi 3000 km lebih untuk bekerja. Faktor penarik adalah berdasarkan pengetahuan mereka, Hongkong akan memberikan gaji yang besar karena negaranya yang lebih maju dibandingkan dengan Indonesia, sehingga mereka beranggapan bahwa jarak bukan merupakan hal yang sangat penting jika dibandingkan dengan hasil yang mereka dapatkan pada akhirnya nanti.

Berbicara tentang banyaknya WNI yang pergi ke Hongkong untuk menjadi TKI adalah karena iklim pekerjaan yang berbeda. Iklim ini termasuk bagaimana kebijakan mengenai

pekerja asing di negara tersebut.²⁰ Sehingga mungkin banyak cerita ataupun pengalaman mereka sendiri yang menyatakan bahwa bekerja disana dapat membantu perekonomian namun masih dalam tahap nyaman untuk bekerja. Dorongan terbesar adalah faktor ekonomi dan tidak adanya lapangan pekerjaan di Indonesia. Penariknya adalah bayaran yang didapat dan kemudahan mengakses pekerjaan yang akan mereka dapatkan, serta bagaimana sistem di negara tujuan dalam mengatasi pekerja asing yang akan masuk dan yang akan keluar. Kekuatan dalam faktor ini akan memberikan dorongan tambahan untuk memenuhi tujuan yang dipilih sejak awal.

Personal Factors

Kebanyakan dari TKI informal yang bekerja ke luar negeri berdasarkan hasil wawancara berangkat karena beberapa faktor. Diantaranya ialah faktor ekonomi, lingkungan, keluarga, dan kemudahan migrasi yang ada.

Dari faktor ekonomi, empat informan penulis menyampaikan bahwa faktor paling utama yang mendorong mereka menjadi TKI ialah keadaan ekonomi mereka yang tergolong dibawah kata mencukupi. Faktor kedua ialah faktor lingkungan. Banyak tetangga-tetangga atau kelompok sekeliling mereka adalah TKI dan terlihat hasil nyatanya bahwa yang menjadi TKI dapat membantu menaikkan keadaan ekonomi, oleh karena itu, informan kami termotivasi untuk menjadi seorang TKI.

Faktor selanjutnya ialah faktor keluarga. Seluruh informan penulis berjenis kelamin wanita, dan rata-rata dari mereka bekerja menjadi pengasuh bayi dan pengasuh lansia. Saat mereka memutuskan berangkat untuk menjadi TKI, mereka mendapatkan dukungan dari keluarga. Saat para narasumber TKI memutuskan untuk menjadi TKI, rata-rata dari mereka belum menikah, dan jika sudah menikah pun, kebanyakan hanya memiliki satu atau dua anak yang masih kecil sehingga masih memungkinkan untuk diurus oleh orang tua dari para TKI itu sendiri. Kemudian faktor terakhir ialah aktor dari adanya kemudahan dalam melakukan migrasi, yang mana mengacu pada hasil wawancara para TKI, di mana keberangkatan mereka ke luar negeri cukuplah mudah. Mereka hanya perlu membayar biaya kurang lebih 1 juta rupiah untuk paspor dan urusan visa. Terdapat juga kemungkinan untuk mereka tidak mengeluarkan biaya sedikitpun (baca: seluruh biaya akan ditanggung oleh PT terlebih dahulu, yang kemudian akan dipotong dari gaji TKI tersebut berdasarkan perjanjian yang dibuat) di mana hal tersebut

²⁰ Maulana Victo, 2015, "*Taiwan: TKI Hidup Nyaman di Negara Kami*" Diakses 8 Mei 2019 <https://international.sindonews.com/read/1051603/40/taiwan-tki-hidup-nyaman-di-negara-kami-1444322830>.

telah diurus oleh PT yang memberangkatkan para TKI, sehingga para TKI tidak perlu kesulitan mengurus hal-hal yang berkaitan dengan pendaftaran dan yang lainnya, melainkan mereka hanya perlu menyiapkan dokumen yang dibutuhkan. Sebelum berangkat, para TKI akan diberikan pelatihan agar ketika berada di negara tujuan, setidaknya mereka telah mengetahui sedikit banyak tentang apa yang akan dan harus dilakukan.

Faktor-faktor tersebut kemudian dapat dikategorikan ke dalam faktor positif, faktor negatif, dan faktor netral dalam proses migrasi yang terjadi. Kategorisasi faktor yang dimaksud dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategorisasi Push and Pull Factors

No	Jenis Faktor	Indonesia	Hongkong
1	Faktor positif	<p>Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan transportasi 	<p>Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian yang baik <p>Lapangan Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tersedia banyak lapangan pekerjaan bagi individu berpendidikan rendah atau menengah <p>Pendapatan di daerah tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Upah cukup tinggi <p>Faktor personal:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Banyak kerabat yang menjadi TKI <p>Transportasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemudahan transportasi
2	Faktor negatif	<p>Ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perekonomian tidak begitu baik <p>Lapangan Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lapangan kerja terbatas bagi individu yang berpendidikan rendah atau menengah 	

		Pendapatan di daerah asal: - Upah rendah	
3	Faktor netral	-	Kesempatan memperoleh pendidikan: - Kualitas pendidikan di Hongkong berada pada 15 besar dunia.

Sumber: Diolah penulis

B. Implementasi Perlindungan *Personal Human Security* TKI

Human security dijelaskan oleh Ajdari dan Asgharpour (2011: 43) sebagai penghapusan kemiskinan dan perampasan, dan menciptakan tingkat kehidupan yang sesuai dan untuk menjamin hak dasar manusia. Lebih lanjut, Gomez dan Gasper mengidentifikasi bahwa terdapat tujuh elemen dalam *human security*, yaitu ekonomi, kesehatan, personal, politik, makanan, kesehatan, dan komunitas.²¹ Barry Buzan menjelaskan bahwa terjadi pergeseran konsep keamanan tradisional menjadi non-tradisional yang lebih menitikberatkan pada manusia.²² Pergeseran konsep keamanan yang terjadi membuat *human security* menjadi perhatian dunia. Pada tahun 1990, Mahbub Ul-Haq meluncurkan *Human Development Report* di PBB. Laporan tersebut menjelaskan bahwa pembangunan harus berfokus pada masyarakat seperti peningkatan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan ekonomi, dan kebebasan politik, tidak hanya berfokus pada keamanan negara saja.²³ Hasil analisis penulis terkait implementasi perlindungan *personal human security* TKI berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Implementasi Perlindungan *Personal Human Security* TKI

No	Aspek	Regulasi	Implementasi
----	-------	----------	--------------

²¹ Behrouz Ajdari, dan Seyed Esmeil Asgharpour, 2011, "*Human Security and Development, Emphasizing on Sustainable Development*", *Proceeding Social and Behavioral Sciences* XIX, 41-46.

²² Barry Buzan, 1991, "*New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*". *Internasional Affairs* LVXII(3), hal. 433.

²³ Gary King, dan Christopher J. L. Murray, 2001, "*Rethinking Human Security*". *Political Science Quarterly* CXVI(4).

1	Perlindungan akan kekerasan	Pasal 8 ayat 1 dan 3, UU Pasal 21	Pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan perlindungan terhadap kekerasan yang dialami oleh TKI jika ada yang melaporkan hal tersebut kepada pemerintah. Pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja dan melalui media apa saja.
2	Pencegahan kecelakaan	Pasal 8 ayat 1 dan 3, Pasal 10, Pasal 21	Pemerintah memiliki mekanisme untuk melakukan pencegahan-pencegahan terkait dengan hal-hal yang tidak diinginkan seperti membekali TKI dengan pelatihan-pelatihan, dan bagaimana cara untuk melaporkan kepada pemerintah jika terjadi kecelakaan.
3	Perlindungan terhadap kejahatan	UU Pasal 8 ayat 1 dan 3, UU Pasal 21	Pemerintah memiliki mekanisme dalam melakukan perlindungan terhadap kejahatan yang dialami oleh TKI jika ada yang melaporkan kejahatan tersebut. Pelaporan dapat dilakukan oleh siapa saja dan melalui media apa saja.

4	Keamanan dari obat-obatan terlarang	Tidak ada UU yang secara spesifik mengatur terkait keamanan TKI dari obat-obatan terlarang.	Belum ada mekanisme yang secara jelas mengatur tentang TKI yang memiliki kasus terkait dengan obat-obatan terlarang. Namun, ada beberapa peristiwa yang melibatkan TKI dan narkoba di mana pemerintah negara tempat TKI bekerja mendeportasi TKI-TKI tersebut.
5	Efisiensi institusi	BAB IV	Demi terciptanya institusi yang lebih efisien, pemerintah membangun Layanan Terpadu Satu Atap yang ada di berbagai daerah di Indonesia guna mempermudah TKI dalam proses penempatan dan perlindungan.
6	Pelecehan gender	Pasal 2	Belum ada undang-undang atau mekanisme terkait dengan adanya pelecehan gender.
7	Pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan terhadap anak	<i>no data</i>	<i>Tidak berhubungan dengan pekerjaan sebagai TKI</i>

8	Akses terhadap informasi publik	Pasal 6 ayat 1 dan 3	Dalam pelatihan, TKI telah diinformasikan bahwa TKI seharusnya bebas dalam mengakses informasi publik maupun berkomunikasi dengan keluarga, namun dalam kenyataannya akses terhadap alat komunikasi didapatkan atas seijin majikan dari masing-masing TKI.
---	---------------------------------	----------------------	--

(Sumber: diolah penulis)

Dalam pengimplementasian UU No. 18 Tahun 2017 terkait dengan kekerasan, kecelakaan, dan kejahatan terhadap TKI, hal tersebut tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga dari seluruh pihak yang terlibat. Suatu kasus yang terjadi terhadap TKI tidak bisa ditangani oleh pemerintah jika tidak ada yang melapor. Meskipun sudah terdapat undang-undang yang mengatur terkait pengawasan TKI, namun tetap saja pemerintah tidak dapat menjangkau ke seluruh tempat di mana para TKI berada ketika mereka bekerja di luar negeri. Untuk mengatasi hal tersebut, selain membuat tempat pengaduan berbasis *offline*, pemerintah juga membuat tempat pengaduan berbasis *online* yang dapat diakses oleh siapa saja di laman Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan pemerintah juga merespon aduan yang mereka dapatkan lewat media sosial seperti *Facebook*. Pemerintah juga menerima pengaduan dari siapa saja baik dari para TKI itu sendiri, keluarga TKI, instansi, maupun orang lain.

Berkaitan dengan TKI dan obat-obatan terlarang, pemerintah belum mengatur hal tersebut di dalam undang-undang. Namun terlepas dari itu, terdapat beberapa kejadian yang melibatkan TKI dan obat-obatan terlarang di mana para TKI tersebut menyelundupkan narkoba ketika melakukan perjalanan ke luar negeri.²⁴ Terdapat juga TKI yang ditangkap di negara

²⁴ Samsul Arifin, 2018, “TKI Asal Sampang Madura yang Selundupkan Narkoba dengan Rice Cooker Dituntut 18 Tahun Penjara”, Diakses 13 Mei 2019 <http://surabaya.tribunnews.com/2018/10/08/tki-asal-sampang-madura-yang-selundupkan-narkoba-dengan-rice-cooker-dituntut-18-tahun-penjara>.

tempat mereka bekerja karena diketahui telah mengkonsumsi obat-obatan terlarang yang mana pada akhirnya para TKI tersebut dideportasi dari negara tempat mereka bekerja.²⁵

Selanjutnya, dalam memudahkan calon TKI yang ingin bekerja di luar negeri, pemerintah pun membuat Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) yang bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pelayanan penempatan dan perlindungan TKI Indonesia. Selain itu, LTSA ini juga digunakan untuk memberikan efisiensi dan transparansi dalam pengurusan dokumen penempatan dan mempercepat peningkatan kualitas pelayanan TKI yang ingin bekerja di luar negeri.

Seperti yang telah diatur oleh undang-undang, TKI yang bekerja memiliki hak untuk tetap mendapat akses terhadap informasi publik dan berkomunikasi dengan keluarga. Namun, dalam kenyataannya tidak semua TKI yang bekerja di luar negeri dapat mengakses kedua hal tersebut. Hal ini terjadi karena setiap TKI yang bekerja harus mendapatkan izin dari majikannya masing-masing dan tidak semua majikan dapat dengan mudah mengizinkan TKI yang bekerja pada mereka untuk mengakses informasi publik atau berkomunikasi dengan orang di luar lingkup keluarga.

5. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa faktor yang memengaruhi seseorang untuk menjadi TKI adalah tersedianya transportasi agar migrasi dapat terjadi dan perekonomian di negara tujuan yaitu Hongkong yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Kemudian, tersedianya lapangan pekerjaan di negara tujuan dibandingkan dengan di Indonesia di mana lapangan pekerjaan dapat dikatakan sangat terbatas. Namun faktor dengan pengaruh yang paling besar ialah *personal factors* yang meliputi keadaan ekonomi keluarga TKI yang dapat dikatakan di bawah kata mencukupi dan kondisi tersebut yang membuat para TKI harus menjadi tulang punggung keluarga, serta termotivasi dari lingkungan mereka yang mana banyak dari tetangga dan kerabat mereka yang menjadi TKI dan mendapatkan kesuksesan secara finansial setelah pulang dari tanah rantau. Kemudian, adanya dukungan dari keluarga serta mudahnya proses yang dilalui untuk menjadi seorang TKI.

Dari aspek perlindungan terhadap *personal human security* TKI, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk memenuhi hal tersebut. Hal ini ditunjukkan dengan

²⁵ Antara, 2014, "16 TKI Dideportasi Malaysia karena Kasus Narkoba", Diakses 13 Mei 2019 <https://www.beritasatu.com/nasional/167599/16-tki-dideportasi-malaysia-karena-kasus-narkoba>.

direvisinya aturan mengenai perlindungan TKI dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri menjadi UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Revisi dari regulasi tersebut telah mengubah paradigma utama yang harus dilakukan, yaitu untuk melindungi TKI, bukan menempatkan mereka ke luar negeri. Dari segi pengaturan perlindungan pun, UU No. 18 Tahun 2017 juga telah melindungi TKI dari segala aspek *personal human security*. Namun yang sangat disayangkan, dalam aturan tersebut tidak memiliki *sense* atas gender, atau dapat dikatakan aturan ini belum bisa melindungi perempuan yang secara proporsi mendominasi sektor pekerjaan TKI informal. Secara implementasi aturan yang ada telah dinilai sangat baik, tetapi dalam prakteknya belum bisa dikatakan optimal. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan, bahkan tidak dihiraukan oleh para TKI itu sendiri karena adanya anggapan bahwa pelanggaran yang sebenarnya terjadi adalah hal yang lumrah, terutama pelanggaran atas hak terhadap privasi dan kasus pelanggaran kontrak seperti *overcharging* serta melakukan pekerjaan diluar kontrak kerja.

6. Referensi

- Ajdari, Behrouz., dan Seyed Esmeil Asgharpour. 2011. “*Human Security and Development, Emphasizing on Sustainable Development*”. *Proceeding Social and Behavioral Sciences XIX*, 41-46.
- Antara. 2014. “16 TKI Dideportasi Malaysia karena Kasus Narkoba”. Diakses 13 Mei 2019 <https://www.beritasatu.com/nasional/167599/16-tki-dideportasi-malaysia-karena-kasus-narkoba>.
- Arifin, Samsul. 2018. “TKI Asal Sampang Madura yang Selundupkan Narkoba dengan Rice Cooker Dituntut 18 Tahun Penjara”. Diakses 13 Mei 2019 <http://surabaya.tribunnews.com/2018/10/08/tki-asal-sampang-madura-yang-selundupkan-narkoba-dengan-rice-cooker-dituntut-18-tahun-penjara>.
- Ayuwuragil, Kustin. 2018. “Kasus Buruh Migran Turun, Angka TKI Meninggal Meningkat”. Diakses 6 Mei 2019 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180225152210-20-278679/kasus-buruh-migran-turun-angka-tki-meninggal-malah-meningkat>.
- BI. 2017. “Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia”. Diakses 5 Mei 2019 http://www.bi.go.id/seki/tabel/TABEL5_30.pdf.
- BNP2TKI. 2017. “148.285 TKI Ditempatkan di Luar Negeri”. Diakses 5 Mei 2019 <http://www.bnp2tki.go.id/read/12708/148.285-TKI-DITEMPATKAN-DI-LUAR-NEGERI>.
- BPS Jawa Timur. 2016. “Pendidikan”. Diakses 8 Mei 2019 <https://jatim.bps.go.id/subject/28/pendidikan.html#subjekViewTab3>.
- BPS Jawa Timur. 2016. “Produk Domestik Bruto Regional Kabupaten/Kota Jawa Timur”. Diakses dari <https://jatim.bps.go.id/subject/162/produk-domestik-regional-bruto--kabupaten-kota-.html#subjekViewTab3>.
- Buzan, Barry. 1991. “*New Patterns of Global Security in the Twenty-First Century*”. *Internasional Affairs LVXII*(3).
- DiscoverHongkong. “Kebersihan Publik”. Diakses 8 Mei 2019 <http://www.discoverhongkong.com/id/plan-your-trip/traveller-info/good-to-know/public-hygiene.jsp>.
- Haornas. “Pengelompokkan Negara Maju Dan Negara Berkembang Oleh UNDP”. Diakses 8 Mei 2019 <https://www.scribd.com/doc/218126313/Pengelompokkan-Negara-Maju-Dan-Negara-Berkembang-Oleh-UNDP>.

- King, Gary. dan Christopher J. L. Murray. 2001. “*Rethinking Human Security*”. *Political Science Quarterly* CXVI(4).
- Lee, Everett. 1966. “*A Theory of Migration*”. *Demography*. 3(1), 47-57.
- Nurdin, Endang. 2017. “*TKI di Hing Kong: Angka penganiayaan fisik, seksual, dan diskriminasi rasial ‘tinggi’*”. Diakses 6 Mei 2019 <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42493279>.
- Putra, Ade. 2017. “*Ada 2,7 Juta TKI di Malaysia, Menkumham: Ini Jumlah Terbesar di Seluruh Dunia*”. Diakses 5 Mei 2019 <https://news.okezone.com/read/2017/11/22/340/1818240/ada-2-7-juta-tki-di-malaysia-menkumham-ini-jumlah-terbesar-dari-seluruh-dunia>.
- Rahmat, P. S. 2009. “*Jurnal Penelitian Kualitatif*”. *Equilibrium Jurnal*, 5(9), 1-8.
- Riana, Friski. 2018. “*Kronologi Kasus TKI Tuti Tursilawati hingga Dieksekusi Mati*”. Diakses 6 Mei 2019 <https://nasional.tempo.co/read/1141430/kronologi-kasus-tki-tuti-tursilawati-hingga-dieksekusi-mati>.
- SuaraBMI.com. *Melihat Sejenak Kehidupan TKI di Hongkong*. Diakses 8 Mei 2019 melalui <http://www.suarabmi.com/2016/04/melihat-sejenak-kehidupan-tki-di.html>.
- Topuniversities.com. 2018. Hongkong. Diakses 8 Mei 2019 dari <https://www.topuniversities.com/university-rankings-articles/qs-best-student-cities/hong-kong>.
- Victo, Maulana. 2015. “*Taiwan: TKI Hidup Nyaman di Negara Kami*”. Diakses 8 Mei 2019 <https://international.sindonews.com/read/1051603/40/taiwan-tki-hidup-nyaman-di-negara-kami-1444322830>.

